

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

_____, *Otonomi daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Husen, La Ode, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung : CV, Utomo, 2005).

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008).

Kaloh, J, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2004).

Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

Nawawi, Handari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994).

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah, edisi revisi*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007).

Sarman, M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Sirajudin, Anix Ibrahim, Nuruddin Haddy, Umar Sholahuddin, *Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*, (Malang : Setara Press, 2009).

Situmorang, Vikto dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan aparaturnya Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Soehardjo, Rudy *Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2004).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004).

_____, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004).

Soekarno, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

Sujatmo, *Norma dan Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Sunaryo, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Syafiie, Inu kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pencabutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Wawancara :

Agus Junaidi, Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, 12 Februari 2019.

Indarto, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara : 13 Februari 2019

Supoyo Raharjo, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, 12 Februari 2019.

Jurnal :

Amalia Diamantina. "Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien" Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39, Nomor 1, 2010:36-43 Diakses pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 13:06.

- Fajar Bayu Suseto.”Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Bekasi” *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, Nomor 2, 2013: 3. Di akses pada hari Minggu 27 Mei 2018 pukul 10:26
- Kemas Arsyian Somad, “*Kedudukan DPRD dalm Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*”, *Masalah-Masalah Hukum*. Vol40 Nomor 4,2011,479.
- Muthia Kamilah.”Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 Di Kota Balikpapan”*ejournal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman*,Vol. 4, Nomor 5,2016: 857-866. Di akses pada hari Jumat 1 Juni 2018 pukul 13:07
- Putrie Anindya Jati. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, Nomor 2, 2016: 2. Diakses pda hari Minggu 27 Mei 2018 pukul 11:43